

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah  
Pemerintah Kota Ambon)**

**Revi Wilhemina Silooy**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pattimura

\*Korespondensi: [silooyrevy78@gmail.com](mailto:silooyrevy78@gmail.com)

---

**Abstract**

*The purpose of this study was to examine the effect of the presentation of financial statements and the internal control system on the accountability of regional financial management. The object of research is 35 Regional Apparatus Organizations (OPD) of the Ambon City Government. Meanwhile, the samples were the head of OPD, the head of the accounting/finance sub-section, the revenue treasurer, and the expenditure treasurer as well as the government's internal auditor. Purposive sampling is a sampling technique used in this study. The criteria used in this sampling technique are: 1. Head of OPD, head of accounting/finance sub-section, revenue treasurer, expenditure treasurer and government internal auditor who has a minimum education of S1 at the Ambon City Government. 2. Head of OPD, head of sub-section of accounting/finance, treasurer of revenue, treasurer of expenditure and government internal auditor who has experience in holding his position for at least 1 year in Ambon City Government. The analytical tool used is multiple linear regression. The results of the study prove that the presentation of financial statements has a significant effect on the accountability of regional financial management. The internal control system has a significant effect on the accountability of regional financial management.*

**Keywords** : *Accountability of Regional Financial Management; Internal Control System; Presentation of Financial Statements.*

---

**PENDAHULUAN**

*Good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) menjadi istilah yang sangat mengemuka sejak dimulainya reformasi di Indonesia. Konsep *good government governance* ada lantaran kinerja pemerintah yang selama ini dianggap menjadi penyelenggara urusan publik kurang efektif. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu alat yang merefleksikan keinginan pemerintah untuk mengimplementasikan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih dalam proses penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Undang-

undang tersebut merupakan landasan hukum dalam pengembangan otonomi daerah yang menjelaskan pemberian otoritas eksekutif dan pelimpahan kewenangan rakyat kepada kepala daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk kewenangan untuk mengelola keuangan daerah. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa penyampaian suatu laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan merupakan suatu usaha nyata dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Laporan keuangan yang disajikan harus memenuhi unsur kualitasnya sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah No71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yakni relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga eksternal pemerintah, memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menggambarkan tingkat akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Adanya perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari kenaikan opini audit dari BPK.

Opini audit WTP dari BPK merupakan puncak tertinggi dari akuntabilitas pengelolaan keuangan pada suatu daerah. Pada tahun 2017-2019 pemerintah kota Ambon telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Walau demikian, tidak berarti bahwa segala sesuatu dalam pengelolaan keuangan dan aset telah baik, sebab ada temuan yang masih harus diperbaiki. Adapun temuan yang disampaikan BPK yakni kelemahan system pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2019 dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun permasalahan dari kelemahan sistem pengendalian intern meliputi perencanaan keuangan daerah tidak dilaksanakan secara memadai, penatausahaan kas daerah belum memadai dan penatausahaan asset tidak tertib. Selanjutnya, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yakni penatausahaan belanja makan dan minum di Sekretariat Kota dan DPRD belum memadai ([www.malukuterkini.com](http://www.malukuterkini.com)).

Selain itu, dua petugas Dinas Persampahan Lingkungan (DLHP) Kota Ambon dan seorang pengelola SPBU telah ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Ambon sebagai tersangka dugaan korupsi Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan pengangkut sampah. Dua petugas tersebut adalah Kepala DLHP yang juga merupakan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan satu orang lagi adalah Manager SPBU di Kota Ambon. Setelah ditemukan berbagai bukti melalui serangkaian proses penyidikan, penyidikan hingga diekspos kasus tersebut, maka Kejari menetapkan tersangka atas penyimpangan anggaran tahun 2019-2020 di DLHP. Kejari mengatakan, penyimpangan anggaran dari pagu anggaran yang ditetapkan DLHP tahun 2019 sebesar Rp.5.633.337.524. Hasil pemeriksaan diduga ada penyimpangan dari kerugian keuangan negara sebesar Rp.1 miliar akan diperluas pada tahun 2020 ([www.malukuterkini.com](http://www.malukuterkini.com)). Kondisi ini memberikan gambaran bahwa opini WTP yang didapatkan tidak menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan yang memadai, dikarenakan masih ada hal-hal/temuan atas laporan keuangan yang perlu dibenahi menjadi lebih baik agar dapat mencapai akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan yang baik pula.

Akuntabilitas ialah sebuah kewajiban yang diharuskan dari pihak yang diberikan amanah atau mandat (*agent*) untuk memberi pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan membicarakan segala aktifitas yang merupakan tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (*principal*) yang mempunyai hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006). Akuntabilitas mencakup pemberian dan penyajian informasi keuangan pada masyarakat dan para pengguna lainnya agar supaya mereka dapat menilai pertanggung jawaban pemerintah mengenai semua kegiatan yang dilakukan, tidak hanya sebatas kegiatan finansialnya saja. Konsep ini menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan (kinerjanya), harus bisa memberi informasi yang diperlukan para pemakai dalam rangka mengambil keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan politik (Halim, 2002).

Penyajian laporan keuangan oleh pemerintah merupakan faktor krusial dalam menghasilkan/menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Olehnya itu, pemerintah diharuskan dan diwajibkan untuk berupaya secara maksimal dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dikarenakan laporan keuangan pemerintah adalah wahana/media untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan. Jadi, saat pemerintah menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan jujur dengan memuat semua informasi keuangan yang terjadi selama satu periode akuntansi maka akuntabilitas pengelolaan keuangan akan dievaluasi semakin baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penyajian laporan keuangan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah yang semakin baik akan semakin memperjelas informasi keuangan yang terjadi, dikarenakan semua transaksi yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disajikan secara lengkap dan jujur sehingga akan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan. Hasil penelitian lain juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penyajian laporan keuangan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Wahyuni, dkk, 2014; Hardiningsih, dkk, 2019; Mansyuer dan Efendi, 2020; Artini dan Putra, 2020). Akan tetapi penelitian Riyansa, dkk (2017) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penyajian laporan keuangan dengan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan diharapkan adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI) supaya proses pengelolaan keuangan bisa tercapai secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat diwujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih. Pengendalian kegiatan/aktivitas pemerintah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memiliki tujuan memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) bagi terciptanya tujuan organisasi melalui kegiatan atau aktivitas yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset dan ketaatan atas peraturan perundang undangan. Faktor SPIP sangat memiliki peran penting dalam mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Olehnya itu, lima komponen SPIP yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan harus dapat dilaksanakan menyatu dan intergral. Hasil penelitian Azizah dkk. (2014), Asfiryati (2017), Hardiningsih dkk. (2019), Sabriani dan Rahayu (2020), Mansyuer dan Efendi (2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara system pengendalian intern dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Berbeda dengan penelitian Artini

dan Putra (2020), yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara system pengendalian intern dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Sabriani dan Rahayu (2020). Perbedaannya ialah pada penelitian sebelumnya menggunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya sebagai objek penelitian, sementara dalam penelitian ini menggunakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Ambon.

Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk Menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara penyajian laporan keuangan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada OPD Pemerintah Kota Ambon. dan untuk manguji secara empiris apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada OPD Pemerintah Kota Ambon.

## **REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS (*jika ada*) (Times New Roman 12)**

### **Reviu Literatur**

#### ***Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan***

Menurut Kusdewanti dan Hatimah (2016) Akuntabilitas muncul karena suatu kebutuhan dalam konteks organisasional ataupun entitas. Pada praktiknya, implementasi mekanisme akuntabilitas kepada siapa suatu pertanggung jawaban diberikan (*principle-agent relationship*) telah melahirkan berbagai zona akuntabilitas. Mekanisme pertanggung jawaban juga sering dinyatakan sebagai relasi antara forum dan aktor. Fokus tidak didasarkan pada apakah aktor tersebut telah melakukan prosedur secara akuntabel, melainkan apakah mereka dinilai akuntabel oleh forum.

Akuntabilitas sangatlah penting, sehingga tidak bisa disangkal bahwa akuntabilitas telah menjadi jargon yang populer, serta tuntutan akan akuntabilitas telah menjadi tema sentral yang selalu disuarakan masyarakat, lembaga-lembaga non pemerintah, mahasiswa, masyarakat awam, swasta serta berbagai institusi negara/pemerintah (Harun, 2009:7).

Menurut Harun (2009:8) Konsep akuntabilitas akan berjalan jika disertai tidak hanya kapasitas dan kesadaran dari pelaksana tugas, tetapi juga memerlukan perhatian serius dari pemberi tugas/amanah serta akibat dari tugas yang telah dilaksanakan. Konsep akuntabilitas ialah suatu konsep yang secara komprehensif membutuhkan tanggung jawab dari pemberi maupun pelaksana tugas/amanah. Konsep akuntabilitas semakin menjadi tidak memiliki arti apabila kapasitas pelaksana terbatas atau dibatasi dan kesadaran akan resiko pelaksana tugas tidak disertai perhatian yang serius dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini yang memberikan mandat/amanah yakni masyarakat (*principal*).

Konsep tentang akuntabilitas adalah suatu konsep yang wajib dilaksanakan baik terhadap entitas swasta juga publik. Boven (2006) menambahkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk hubungan antara pihak pengelola dan masyarakat. Pengelola mempunyai kewajiban buat menaruh suatu penerangan pada masyarakat/lembaga terkait keadaan yang sebenarnya terjadi pada organisasi. Hal ini penting mengingat publik, selaku prinsipal perlu mengetahui segala sesuatu yang terjadi di masyarakat.

Konsekuensi atas pengelolaan sumber daya yang diserahkan principal pada pemerintah selaku steward, maka pemerintah mempunyai tanggungjawab buat mempertanggungjawabkan penggunaan asal daya/dana publik menjadi bentuk akuntabilitasnya pada principal. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban individu atau unit organisasi yang mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian

sumber daya serta penerapan kebijakan yang dipercayakan kepadanya sehubungan dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan melalui media akuntabilitas (LAN, 2003). Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:20) Akuntabilitas publik berarti kewajiban para pihak pemegang amanah atau mandat (agen) untuk memberi pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua aktifitas yang merupakan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan suatu proses pengelolaan keuangan daerah yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan harus bisa dilaporkan dan dipertanggungjawabkan pada masyarakat dan DPRD mengenai kegagalan juga keberhasilannya sebagai bahan penilaian untuk tahun berikutnya. Masyarakat tidak saja sekedar berhak tau tentang pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh pemerintah, namun juga berhak menuntut pertanggungjawaban terhadap penerapan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (Halim: 2002).

### ***Penyajian Laporan Keuangan***

Penyajian laporan keuangan sangatlah vital untuk dilakukan oleh entitas pelapor, karena merupakan sarana untuk memberikan kemudahan dalam menciptakan akuntabilitas publik adalah dengan menyampaikan laporan keuangan secara komprehensif (Superdi, 2017). Dengan demikian, pemerintah daerah yang dipercaya untuk mengelola sumber daya keuangan yang ada harus bisa memberikan pertanggungjawaban publik melalui penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara lengkap, jujur dan tepat waktu.

Elemen fundamental dari transparansi dan akuntabilitas adalah dengan mengungkapkan informasi laporan keuangan (Diamond, 2002) dikutip dalam (Hehanussa, 2015). Informasi keuangan disediakan oleh entitas pelapor untuk membantu para pemakai dalam menilaidan mengavaluasi kinerja entitas terkait alokasi sumber daya ekonomik.

Menurut Nordiawan (2010), tujuan disajikannya laporan keuangan ialah untuk:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran,
2. Menyediakan informasi mengenai kesamaan cara untuk memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan *budget* yang telah ditentukan,
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang dipakai,
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan membiayai semua kegiatannya dan mencukupi keperluan kasnya,
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan terakit dengan sumber-sumber penerimaannya,
6. Menyediakan informasi mengena posisi keuangan entitas pelaporan.

### ***Sistem Pengendalian Intern***

Pengendalian intern adalah rencana dan metode dari sebuah organisasi yang dipakai dalam rangka menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan terpercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Krismiaji, 2015). Pengendalian intern merupakan salah satu dasar terkuat *good governance*. Pengendalian intern mencakup berbagai alat

manajemen yang memiliki tujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah, dan menjamin pengamanan asset negara (Purnomo, dan Budiawan 2014).

Sementara dalam COSO, pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh direksi, manajemen, dan personel lainnya, yang didesain untuk memberi keyakinan memadai atas terwujudnya tujuan dalam efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku (Kresiadanti, 2013:4).

Pengendalian internal yang kuat akan dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan sebaliknya jika pengendalian internalnya lemah maka akuntabilitas pengelolaan keuangan akan semakin menurun. Pengendalian internal yang efektif mampu memberi keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi yang terlihat dari penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

Instansi pemerintah dituntut dan diwajibkan untuk mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien, dalam upaya perwujudan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana. Diperolehnya keyakinan yang memadai, bahwa dana yang dipercayakan kepada pemerintah telah dikelola dengan baik, diwujudkan dengan peningkatan dalam: 1) Efisiensi dan efektivitas yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan/program kerja pemerintah; 2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan/program yang lebih tepat waktu kepada *shareholders* dan juga *stakeholders*; 3) ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan, diwujudkan melalui semakin menurun atau berkurangnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan anggaran belanja negara (BPKP, 2009:28).

### **Hipotesis**

#### ***Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan***

Peran utama dari akuntansi sector public adalah untuk menyiapkan laporan keuangan yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009:159). Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan mampu menciptakan transparansi dan nantinya menciptakan akuntabilitas (Nordiawan, 2010). Salah satu manfaat informasi keuangan menurut Diamond dalam Nurizkana, dkk (2017) adalah meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda). Mereka bertanggung jawab tidak saja terbatas pada kas masuk dan kas keluar saja, namun pada asset dan utang yang dikelola juga, sehingga media akuntabilitas yang memadai adalah bentuk laporan yang dapat memberikan gambaran mengenai tercapainya tujuan, program dan kegiatan atas pengelolaan sumber daya suatu instansi.

*Stewardship theory* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991:62), dimana manajemen organisasi sebagai *steward*/penatalayanan (pemerintah) akan bertindak dengan kesadaran penuh, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi, sehingga *steward* (pemerintah) bekerja dan menjalankan aktivitasnya atas nama masyarakat (*principal*). Dalam organisasi sektor publik, pemerintah adalah *steward* dan publik adalah pemiliknya (*principal*). Pemerintah Daerah sebagai pemegang amanah publik akan berupaya untuk memberi pelayanan dan tanggungjawab sebaik mungkin kepada publik melalui penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Sesuai dengan perspektif *stewardship theory*, maka penyajian laporan keuangan oleh *steward* tidak

didasarkan pada kepentingan individu atau golongan melainkan kepentingan organisasi maupun *principal* untuk meyakinkan masyarakat/principal bahwa sumber daya financial yang dipercayakan kepadanya telah dikelola sebaik mungkin, sehingga memiliki dampak pada baiknya akuntabilitas/pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Salah satu unsur penting sehingga laporan keuangan dapat berperan sebagai media akuntabilitas apabila laporan keuangan disusun dan disajikan tepat waktu. Olehnya itu, laporan keuangan pemerintah yang disajikan secara tepat waktu akan bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan baik keputusan dibidang manajerial maupun bidang ekonomi. Selain dilihat dari persepektif ketepatan waktu penyajian laporan keuangan, pengungkapan laporan keuangan secara memadai, lengkap dan rinci juga merupakan komponen yang wajib dipenuhi dalam laporan keuangan pemerintah sehingga dapat terwujudnya akuntabilitas dibidang keuangan.

Penyajian laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas keuangan pemerintah yang disajikan secara *full disclosure* (pengungkapan penuh) bermanfaat bagi semua pihak dalam mengambil keputusan sehingga hak-hak publik dapat terpenuhi yakni hak untuk mengetahui, hak untuk diberikan informasi dan hak untuk aspirasinya didengar. Jadi, apabila penyajian laporan keuangan mengungkapkan perbedaan anggaran dan realisasinya yang disertai dengan penjelasan penyebab ketercapaian dan ketidaktercapaian dari setiap anggaran yang sudah ditetapkan dinilai telah memenuhi unsur akuntabilitas. Disamping itu entitas akuntansi perlu menjelaskan dalam laporan keuangan terkait dengan penggunaan anggaran yang dihubungkan dengan tingkat ketercapaian atas tujuan suatu program atau kegiatan yang dilakukan disertai dengan penjelasan atas dampak dan manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan program dan kegiatan entitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili (2016), Wahyuni, dkk (2014), Hardiningsih, dkk (2019), Mansyuer dan Efendi (2020), Artini dan Putra (2020) telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penyajian laporan keuangan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi Riyansa, dkk (2017) membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara penyajian laporan keuangan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Dengan demikian maka hipotesis dalam penelitian ini diajukan sebagai berikut:

**H1 : Penyajian Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.**

### ***Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.***

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan pengendalian intern ialah proses yang dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang tercapainya tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan program atau kegiatan serta peraturan perundang-undangan yang dipatuhi.

*Stewardship theory* oleh Donaldson dan Davis (1991:62), menjelaskan manajemen organisasi selaku *steward*/penatalayanan (pemerintah) akan bertindak secara penuh kesadaran, secara arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi, sehingga *steward* (pemerintah) bekerja dan menjalankan aktivitasnya atas nama masyarakat (*principal*). Sesuai dengan perspektif *stewardship theory*, maka penerapan system pengendalian intern yang efektif tidak didasarkan pada kepentingan individu

atau golongan melainkan kepentingan organisasi maupun *principal* untuk meyakinkan masyarakat/principal bahwa dana publik yang dimiliki telah dijaga, diawasi, dikelola sebaik-baiknya, sehingga memiliki dampak pada baiknya akuntabilitas/pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Pemerintah dalam menjalankan amanah masyarakat memiliki otoritas atas pengendalian seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya. Lemahnya pengendalian intern dapat menimbulkan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi kurang handal dan relevan untuk keputusan yang dibuat (Mardiasmo, 2002:34). Laporan keuangan yang andal dan relevan mencerminkan integritas pelaporan keuangan pemerintah sebagai wujud akuntabilitas keuangan.

Sistem pengendalian intern yang diterapkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan akan mampu memberikan jaminan bahwa seluruh rangkaian proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan keuangan diawali dari perencanaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban, berjalan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan demikian efektif tidaknya penerapan sistem pengendalian intern akan sangat berpengaruh terhadap baiknya akuntabilitas keuangan pemerintah.

Hasil penelitian Azizah, dkk (2014), Asfiryati (2017), Hardiningsih, dkk (2019), Sabriani dan Rahayu (2020), Mansyuer dan Efendi (2020) membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, Artini dan Putra (2020) membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Dengan demikian maka hipotesis dalam penelitian ini diajukan sebagai berikut:

**H2 : Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian penjelasan (*explanatory/confirmatory research*) lantaran penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti melalui pengujian hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya. Data yang dipakai dalam penelitian ini berbentuk angka-angka sehingga termasuk dalam pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang berlandaskan filsafat positifisme, dipakai untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data memakai instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan disebut sebagai penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2016:8).

Wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menunjukkan ciri dan karakteristik tertentu yang dipelajari oleh peneliti dan ditentukan untuk menarik kesimpulan disebut populasi (Sugiyono, 2016:80). Berdasarkan pendapat yang diutarakan oleh Sugiyono diatas, maka populasi yang ditentukan oleh penulis adalah seluruh pegawai yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Ambon.

Bagian dari jumlah dan karaktersistik yang dimiliki oleh populasi disebut sebagai sampel (Sugiyono, 2016:81). Untuk itu sampel yang dipilih dari populasi harus betul-betul *representative* (mewakili), sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kepala OPD, kepala sub bagian akuntansi/keuangan, bendahara penerimaan,

dan bendahara pengeluaran serta auditor internal pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Ambon.

*Non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu, digunakan dalam penelitian ini. Adapun kriterianya antara lain:

1. Kepala OPD, kepala sub bagian akuntansi/keuangan, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran serta auditor pemerintah yang memiliki pendidikan minimal S1 pada Pemerintah Kota Ambon
2. Kepala OPD, kepala sub bagian akuntansi/keuangan, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran serta auditor internal yang memiliki pengalaman dalam memegang jabatannya minimal 1 tahun pada Pemerintah Kota Ambon.

### **Variabel Penelitian**

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen/bebas yakni penyajian laporan keuangan (X1), sistem pengendalian intern (X2) serta variabel terikat yakni akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y).

### **Pengukuran Variabel**

#### ***Penyajian Laporan Keuangan (X1)***

Penyajian laporan secara struktur tentang keuangan dan transaksi-transaksi yang terjadi pada suatu instansi disebut sebagai penyajian laporan keuangan yang secara umum memiliki tujuan dalam memberi informasi tentang posisi keuangan entitas pelapor, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan yang dapat digunakan para pemakai membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya (PP No 71 tahun 2010). Bagian penting dalam menghasilkan akuntabilitas sektor publik adalah dengan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang harus sesuai dengan karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner yang diadopsi dari penelitian (Hasibuan, 2018), Sabriani dan Rahayu (2020) yang meliputi 8 pernyataan dengan skala likert 5 poin. Point 1 (STS = Sangat Tidak Setuju), point 2 (TS = Tidak Setuju), point 3 (N= Netral), point 4 (S= Setuju), point 5 (SS=Sangat Setuju).

#### ***Sistem Pengendalian Intern (X2)***

Menurut Rai (2011), pengendalian intern merupakan sebuah rancangan kebijakan dan mekanisme bagi manajemen dalam memberikan secara memadai keyakinan bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner yang meliputi 8 pernyataan dengan skala likert 5 poin diadopsi dari penelitian Hasibuan (2018), Sabriani dan Rahayu (2020). Point 1 (STS= Sangat Tidak Setuju), point 2 (TS= Tidak Setuju), point 3 (N= Netral), point 4 (S= Setuju), point 5 (SS=Sangat Setuju).

#### ***Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)***

Dalam Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2003), dikatakan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban tentang integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner yang meliputi 9 pernyataan

dengan skala likert 5 poin diadopsi dari penelitian Pradnyani (2014), Sabriani dan Rahayu (2020). Point 1 (STS= Sangat Tidak Setuju), point 2 (TS= Tidak Setuju), point 3 (N= Netral), point 4 (S= Setuju), point 5 (SS=Sangat Setuju).

## **Instrumen Penelitian**

### ***Uji Validitas***

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur apakah suatu instrument kuesioner dinyatakan valid atau tidak. Suatu pernyataan dalam kuesioner apabila mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur maka dapat dikatakan bahwa kuesioner tersebut valid (Ghozali, 2013:52). Untuk menguji bahwa kuesioner tersebut valid dapat dilakukan dengan menggunakan uji *person correlation*, yaitu cara menghitung korelasi antara nilai yang didapati dari pernyataan-pernyataan (Ghozali, 2013:54). Jika nilai *pearson correlation* masing-masing item pernyataan dalam kuesioner memiliki nilai  $\geq 0,3$ , maka item kuesioner tersebut dikatakan valid.

### ***Uji Reliabilitas***

Keandalan suatu alat ukur (kuesioner) dapat diketahui dengan melakukan uji reabilitas. Jika hasil pengujian dengan menggunakan kuesioner tersebut memberikan hasil yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, maka kuesioner tersebut dikatakan handal atau reliabel.

Pengujian ini dilakukan dengan cara One Shot atau satu kali pengukuran saja. Artinya pengujian yang hanya dilakukan sekali dan hasil tersebut akan dibandingkan dengan pernyataan lain. Suatu variabel dikatakan reliabel jika mempunyai nilai *Conbrach Alpha*  $> 0,70$  (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2013:48).

### ***Uji Asumsi Klasik***

Demi menghindari adanya bias dalam analisis data serta untuk terhindar dari kesalahan spesifikasi (*misspecification*) dalam sebuah model regresi, maka dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi linear. Adapun pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi disebut sebagai pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan untuk uji autokorelasi tidak dapat dilakukan dikarenakan penelitian ini memiliki data bersifat *time series* bukan *cross section*.

### ***Uji Normalitas***

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013: 160). Pada penelitian ini, uji normalitas menggunakan *Normal Probability Plot (P-Plot)*. Suatu data dinyatakan normal apabila gambar distribusi dengan titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal (Ghozali, 2013:163). Uji normalitas juga dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah residual data terdistribusi secara normal. Residual data terdistribusi secara normal ketika tingkat signifikansi di atas 0,05 (Ghozali, 2013: 165).

### ***Uji Multikolinearitas***

Sebuah model regresi yang baik semestinya tidak memiliki hubungan atau korelasi antara variabel independen dalam model penelitian, sehingga dilakukannya uji

multikolinearitas untuk mengetahui apakah ada korelasi atau tidak (Ghozali, 2013:105). Model regresi yang bebas dari problem multikolinearitas jika memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1 (Ghozali, 2013:106).

### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji ini bertujuan untuk menguji ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam sebuah model regresi. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain itu tetap, maka disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain itu berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas (Ghozali, 2013: 139). Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot*. Indikasi adanya heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatter plot dimana terdapat titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada polayang jelas misalkan ditemukan adanya titik-titik tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat dinyatakan tidak terjadi problem heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.

### **Uji Hipotesis**

Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis yang telah ada yakni pengaruh penyajian laporan keuangan (X1) dan sistem pengendalian intern (X2) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y). Adapun rumus regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

- a : Konstant
- $\beta$  : Koefisien Regresi
- Y : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
- X<sub>1</sub> : Penyajian Laporan Keuangan
- X<sub>2</sub> : Sistem Pengendalian Intern
- e : Error

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Instrumen Penelitian**

#### **Uji Validitas**

Uji validitas menunjukkan seberapa nyata atau benar kuesioner tersebut mengukur apa yang semestinya diukur. Penulis melakukan teknik analisis *bivariate correlation* antara masing-masing skor indikator dengan total skor variabel untuk menguji valid atau tidaknya kuesioner yang digunakan. Indikator dalam kuesioner dinyatakan valid apabila memiliki nilai *pearson correlation*  $\geq 0,3$  dengan nilai signifikan < 0,05. Sesuai dengan hasil pengolahan data maka dapat diketahui hasil uji validitas untuk variabel-variabel penelitian diuraikan seperti tampak pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Indikator	<i>Pearson Correlation</i>	Signifikan	Kesimpulan
----------	-----------	----------------------------	------------	------------

Penyajian Laporan Keuangan (X1)	X1.1	0.610	0.000	Indikator ini Valid
	X1.2	0.758	0.000	Indikator ini Valid
	X1.3	0.789	0.000	Indikator ini Valid
	X1.4	0.699	0.000	Indikator ini Valid
	X1.5	0.774	0.000	Indikator ini Valid
	X1.6	0.742	0.000	Indikator ini Valid
	X1.7	0.703	0.000	Indikator ini Valid
	X1.8	0.735	0.000	Indikator ini Valid
Sistem Pengendalian Intern (X2)	X2.1	0.648	0.000	Indikator ini Valid
	X2.2	0.661	0.000	Indikator ini Valid
	X2.3	0.792	0.000	Indikator ini Valid
	X2.4	0.673	0.000	Indikator ini Valid
	X2.5	0.807	0.000	Indikator ini Valid
	X2.6	0.683	0.000	Indikator ini Valid
	X2.7	0.846	0.000	Indikator ini Valid
	X2.8	0.706	0.000	Indikator ini Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)	Y1.1	0.775	0.000	Indikator ini Valid
	Y1.2	0.810	0.000	Indikator ini Valid
	Y1.3	0.796	0.000	Indikator ini Valid
	Y1.4	0.761	0.000	Indikator ini Valid
	Y1.5	0.736	0.000	Indikator ini Valid
	Y1.6	0.742	0.000	Indikator ini Valid
	Y1.7	0.779	0.000	Indikator ini Valid
	Y1.8	0.747	0.000	Indikator ini Valid
	Y1.9	0.557	0.000	Indikator ini Valid

Sumber: olahan data kuesioner, 2022

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa semua pernyataan adalah valid dimana nilai *pearson correlation* yang diperoleh  $> 0.3$  pada taraf signifikan 5% (0.05) sehingga pernyataan tersebut dapat dimasukkan dalam pengolahan data selanjutnya. Hasil ini juga menunjukkan bahwa semua item pernyataan dapat dipercaya keabsahannya sebagai alat ukur untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y), penyajian laporan keuangan (X1), dan sistem pengendalian intern (X2).

#### *Uji Realibilitas*

Tujuan dilakukannya pengujian ini adaah untuk mengetahui konsistensi derajat ketergantungan dan stabilitas dari suatu kuesioner. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode *internal consistency*. Reliabilitas instrument penelitian di uji menggunakan rumus koofisien *cronbach's alpha*. Instrumen penelitian (kuesioner) dinyatakan handal atau reliabel jika memiliki nilai *cronbach alpha*  $\geq 0.60$ . Hasil uji reliabilitas variabel-variabel penelitian dapat diuraikan seperti tampak pada tabel 4.8 di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	0.866	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern (X2)	0.852	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keu (Y)	0.894	Reliabel

Sumber: olahan data kuesioner, 2022

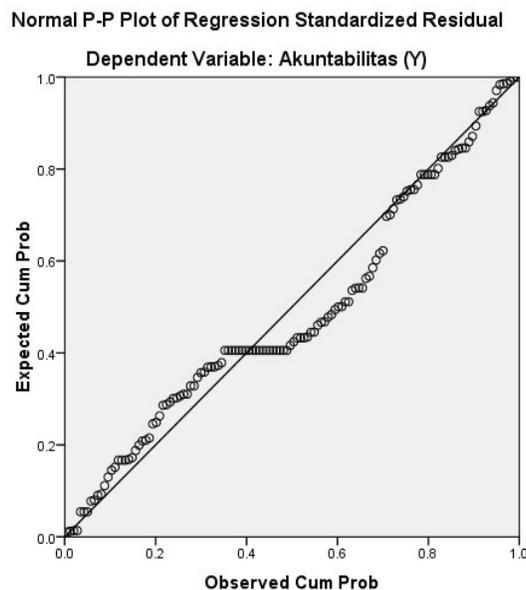
Dari tabel 2 diatas menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliabel dengan nilai *cronbach alpha* masing-masing variabel lebih besar dari 0.60, sehingga dapat digunakan untuk pengujian atau pengolahan data selanjutnya yakni uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

#### *Uji Asumsi Klasik*

Untuk menghindari adanya bias dalam analisis data serta untuk terhindar dari kesalahan spesifikasi (*misspecification*) dalam sebuah model regresi, maka dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi linear. Adapun pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi disebut sebagai pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan untuk uji autokorelasi tidak dapat dilakukan dikarenakan penelitian ini memiliki data bersifat *time series* bukan *cross section*.

### Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah data variabel independen dan dependen berdistribusi normal atau tidak maka dilakukanlah uji normalitas. Sebuah model regresi yang baik yakni yang mempunyai distribusi data secara normal atau mendekati normal. Data terdistribusi secara normal atau tidak, dapat diketahui dengan melihat grafik *normal probability plot* dan uji *statistic one sample kolmogorov-smirnov test*. Data terdistribusi secara normal atau asumsi normalitasnya terpenuhi, jika pada grafik *normal probability plot*, terlihat titik-titik menyebar berhempit disekitar area garis diagonal dan searah mengikuti garis diagonal. Selanjutnya, pada hasil uji *statistic one sample kolmogorov smirnov test* memiliki nilai signifikan  $> 0,05$ . Hasil uji normalitas akan diuraikan seperti tampak dibawah ini:



**Gambar 1. Normal Probability Plot**

Pada gambar 1 diatas dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi secara normal atau data memenuhi asumsi normalitas. Hal ini dikarenakan titik-titik menyebar berhempit disekitar garis diagonal dan searah mengikuti garis diagonal pada grafik *normal probability plot*.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		132
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.81081462
Most Extreme Differences	Absolute	.118
	Positive	.118
	Negative	-.073
Kolmogorov-Smirnov Z		1.351
Asymp. Sig. (2-tailed)		.052

Sumber: olahan data kuesioner, 2022

Pada tabel 3 diatas, dapat disimpulkan bahwa residual data terdistribusi secara normal atau asumsi normalitas terpenuhi. Hal ini dikarenakan hasil uji *one sample kolmogorov smirnov test* memiliki nilai *asympt sig (2-tailed)*  $0,052 > 0,05$ .

#### ***Uji Multikolinearitas***

Baiknya suatu model regresi adalah yang tidak ditemukan adanya hubungan antara variable independen dan untuk mengetahui adanya korelasi tersebut maka perlu dilakukan uji multikolinearitas. Model regresi dinyatakan tidak ada multikolinearitas atau tidak ada korelasi antara variable independen jika mempunyai nilai *tolerance*  $> 0.10$  dan nilai VIF  $< 10$ . Hasil uji multikolinearitas disajikan seperti tampak pada table dibawah ini:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

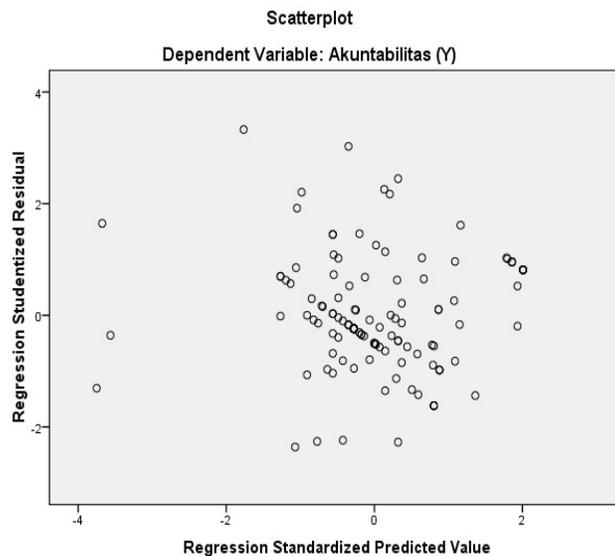
Model	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	0.540	1.850	Bebas Multikol
Sistem Pengendalain Intern (X2)	0.540	1.850	Bebas Multikol

Sumber: olahan data kuesioner, 2021

Dari tabel 4 diatas dapat dinyatakan bahwa tidak ada korelasi atau hubungan antara variable independen atau tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini dikarenakan tidak ada variable independen yang mempunyai nilai *tolerance*  $< 0,10$  dan nilai VIF  $> 10$ .

#### ***Uji Heteroskedastisitas***

Untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya, maka dilakukanlah uji heteroskedastisitas. Apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain itu tetap, maka dikatakan homoskedastisitas dan apabila berbeda maka dikatakan heteroskedastisitas. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat gambar *scatter plot*. Data penelitian dinyatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas, jika pada gambar *scatter plot* ditemukan titik-titik menyebar secara acak (random) baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan sebagai berikut:



**Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan grafik *scatterplot* pada gambar 2 diatas dapat dinyatakan bahwa data penelitian memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan terdapat titik-titik menyebar secara acak (random) diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y pada grafik *scatterplot*.

#### **Analisis Regresi Berganda**

Hasil uji asumsi klasik secara keseluruhan menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi klasik, sehingga diperbolehkan untuk melakukan pengujian analisis regresi linear berganda untuk menjawab hipotesis yang ada. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Ambon.

Pengujian atas hipotesis dilakukan secara parsial. Hipotesis null ( $H_0$ ) menyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternative ( $H_a$ ) menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam hal untuk membuktikan bahwa apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka dasar pengambilan keputusannya menggunakan probabilitas signifikan 0,05. Jika probabilitas signifikan  $< 0,05$ , dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitupun sebaliknya.

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dapat disajikan dalam bentuk output seperti dibawah ini:

**Tabel 5**  
**Koefesien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.687 <sup>a</sup>	.471	.463	2.833

Sumber: olahan data kuesioner, 2022

Nilai koefesien determinasi (*Adjust R Square*) sebesar 0,463 yang memiliki arti bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y) dapat dipengaruhi oleh variabel

penyajian laporan keuangan (X1) dan sistem pengendalian intern (X2) sebesar 46,3%. Sedangkan sisanya 53,7% dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak sempat diuji dalam model regresi penelitian ini.

**Tabel 6**  
**Uji Simultan (Uji F)**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	922.920	2	461.460	57.516	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1034.989	129	8.023		
Total		1957.909	131			

Sumber: olahan data kuesioner, 2022

Sesuai dengan hasil uji statistik (uji f) pada tabel 6 diatas, telah diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 57,516 dengan nilai signifikan 0,000. Oleh karena nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ , maka dapat diberikan kesimpulan bahwa secara bersama-sama (simultan) penyajian laporan keuangan (X1) dan sistem pengendalian intern (X2) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Ambon.

**Tabel 7**  
**Uji Parsial (Uji T)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.437	2.403		5.176	.000
	Penyajian (X1)	.560	.090	.541	6.216	.000
	SPI (X2)	.198	.089	.193	2.212	.029

Sumber: olahan data kuesioner, 2021

Dari tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa model regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:  $Y = 12.437 + 0.560X1 + 0.198X2$ .

Secara parsial, hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan (X1) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y). Sesuai dengan hasil uji statistik (uji t) pada tabel 4.13 diatas, diketahui bahwa variabel penyajian laporan keuangan (X1) memiliki nilai signifikan 0,000 dengan *beta coefficients standardizad* 0,541. Oleh karena nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ , maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya, hipotesis pertama (H1) diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern (X2) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y). Sesuai dengan hasil uji statistik (uji t) pada tabel 4.13 diatas, diketahui bahwa variabel sistem pengendalian intern (X2) memiliki nilai signifikan 0,029 dengan *beta coefficients standardized* 0,193. Oleh karena nilai signifikan  $0,029 < 0,05$ , maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya, hipotesis kedua (H2) diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

#### **Pembahasan Hipotesis**

#### ***Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan***

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan demikian,

hasil penelitian ini semakin memperkuat penelitian Nurlaili (2016), Wahyuni, dkk (2014), Hardiningsih, dkk (2019), Mansyuer dan Efendi (2020), Artini dan Putra (2020) yang juga menyimpulkan hal yang sama yakni akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat dipengaruhi oleh penyajian laporan keuangan. Tentunya semakin baik informasi laporan keuangan maka semakin berkualitas pula laporan keuangan pemerintah daerah, karena semua transaksi yang terjadi selama satu periode berjalan, dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan penyajiannya secara lengkap, jujur serta tepat waktu sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Kesimpulan yang berbeda ditemukan dalam penelitian Riyansa, dkk (2017) yang menyatakan akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak dapat dipengaruhi oleh penyajian laporan keuangan.

Penyajian informasi laporan keuangan dapat menciptakan transparansi dan juga akuntabilitas. Laporan keuangan yang disajikan tepat waktu, diungkapkan secara lengkap dan rinci dapat berperan dalam meningkatkan akuntabilitas. Dikatakan demikian, karena penyajian laporan keuangan sebagai bentuk dari akuntabilitas pemerintah daerah yang wajib menyajikan secara *full disclosure* (pengungkapan penuh) kepada pihak-pihak yang berkepentingan tidak terkecuali masyarakat guna pengambilan keputusan, sehingga hak-hak publik yakni hak untuk mengetahui, hak untuk diberikan informasi dan hak untuk didengar aspirasinya dapat terpenuhi dengan baik.

*Stewardship theory* oleh Donaldson dan Davis (1991:62), menjelaskan manajemen organisasi sebagai *steward*/penatalayanan (pemerintah) akan bertindak secara sadar, secara arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi, sehingga *steward* (pemerintah) bekerja dan menjalankan aktivitasnya atas nama masyarakat (*principal*). Dalam organisasi pemerintah, *steward* adalah pemerintah sendiri dan publik adalah pemiliknya (*principal*). Pemerintah Daerah selaku pemegang amanah publik berusaha untuk memberi pelayanan dan tanggungjawab sebaik mungkin kepada publik. Salah satu amanah tersebut adalah mengelola dana publik yang sudah semestinya dipertanggungjawabkan melalui penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

Sesuai dengan perspektif *stewardship theory*, maka penyajian laporan keuangan oleh *steward* tidak didasarkan pada kepentingan individu atau golongan melainkan kepentingan organisasi maupun *principal* untuk meyakinkan masyarakat/principal bahwa sumber daya financial yang dipercayakan kepadanya telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat selaku *principal*, sehingga berdampak pada akuntabilitas/pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang baik pula.

#### *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.*

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan nilai signifikan 0,029. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini semakin memperkuat penelitian Azizah, dkk (2014), Asfiryati (2017), Hardiningsih, dkk (2019), Sabriani dan Rahayu (2020), Mansyuer dan Efendi (2020) yang juga menyimpulkan hal yang sama yakni akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern secara signifikan. Namun, dalam hasil penelitian Artini dan Putra (2020) menyimpulkan hal yang berbeda yakni sistem pengendalian intern tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Penerapan sistem pengendalian intern yang baik dan efektif sangat berperan penting dalam mengurangi risiko adanya kekeliruan maupun kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga nantinya mampu menciptakan laporan keuangan yang berkualitas sebagai perwujudan dari akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dikatakan demikian, karena salah satu cara yang tepat dan relevan untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu instansi serta memiliki peran krusial dalam usaha untuk mencegah dan mendeteksi *fraud* dalam pengelolaan keuangan adalah dengan menerapkan sistem pengendalian intern.

*Stewardship theory* oleh Donaldson dan Davis (1991:62), menjelaskan manajemen organisasi sebagai *steward*/penatalayanan (pemerintah) akan bertindak secara sadar, secara arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi, sehingga *steward* (pemerintah) bekerja dan menjalankan aktivitasnya atas nama masyarakat (*principal*). Sesuai dengan perspektif *stewardship theory*, maka penerapan sistem pengendalian intern yang efektif tidak didasarkan pada kepentingan individu atau golongan melainkan kepentingan organisasi maupun *principal* untuk meyakinkan masyarakat/principal bahwa sumber daya yang dimiliki telah dijaga, diawasi, dikelola dengan baik sesuai dengan peran dari SPIP yang diatur dalam PP nomor 60 tahun 2008, sehingga berdampak pada akuntabilitas/pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang baik pula.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:1). Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penyajian laporan keuangan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. dan 2). Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem pengendalian intern dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Saran Untuk Penelitian Selanjutnya**

Berikut dapat diajukan beberapa saran setelah dilakukannya penelitian ini, antara lain: Nilai *Adjust R-Square* yang dihasilkan hanya sebesar 46.3% yang berarti bahwa masih terdapat banyak variabel independen lain yang tidak menutup kemungkinan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan yang tidak sempat diuji dalam penelitian ini. Teknik wawancara dapat dipergunakan pada penelitian selanjutnya sehingga dapat menghasilkan hasil yang mungkin saja berbeda. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya selain Pemerintah Kota Ambon.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Artini, Ni Luh Wulan dan Putra, I Putu Deddy Samtika, 2020. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksebilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung)". *Hita Akuntansi dan Keuangan*, Edisi Oktober 2020.

- Asfiryati, Dewi. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada SKPD Kota Dumai). *JOM Fekon* Vol. 4 No. 1 : 1986 – 1999.
- Badan Akuntansi Keuangan Negara Departemen Keuangan RI. 2001. Sistem Akuntansi Keuangan. Jakarta : Departemen Keuangan RI.
- Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta : PT Indeks.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Hardiningsih, dkk. 2019. Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang). *Jurnal Akuntansi Syariah*. Vol 2 No 1, Juni 2019. Hal 21-42
- Hasibuan, Nurul Hidayah. 2018. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pemerintah Kota Tebing Tinggi). *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara
- Mansyuer Theresia Yuliana dan Efendi David, 2020. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penyajian Dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Nurritziana, Baiq., dkk. 2017. Determinan Transparansi Dan Akuntabilitas
- Nurlaili. 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Skpd Kabupaten Bengkalis). *Jom Fekon* Vol.3 No.1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Raharjo, E. 2007. Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2 (1): 37-46.
- Sabriani Ajeng Ayu dan Rahayu Sri, 2020. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kota Tasikmalaya)”. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*. Vol 5 Nomor 2, Juli 2020.
- Soleha, Nurhayati. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi pada SKPD Kabupaten/Kota Propinsi Banten. *Jurnal Etikonomi* Vol. 13 No. 1 :21-34.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Wahyuni, dkk. 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesinilitas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Badung). *e-Journal SI Ak*. Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 2 Nomor 1, 2014).